

SOSIO YUSTISIA

Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial



E-ISSN 2776-3323
P-ISSN 2776-4540

Kewenangan Gubernur Menetapkan Upah
Pasca Pemberlakuan UU No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Penetapan
UMP dan UMK tahun 2021 di Jawa Timur)

Himawan Estu Bagijo

Urgensi Peralihan Dana Desa Untuk
Penanggulangan Bencana Covid-19

Selvy Melda Hartanti
Anis Farida
Faizur Rahman
Ulil Manaqib

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah
Konstitusi yang Bersifat Non Self
Executing

Siti Partiah
Anis Farida

Implementasi Nilai Demokrasi
Pancasila dalam Model
Kepemimpinan di Indonesia

Fahrur Rozi
Priyo Handoko
Elva Imeldatur Rohmah

Relasi Islam - Negara dalam
Pembentukan Hukum di Indonesia

Fariz Ulul Abshar
Lu'lu'il Maknun
Ana Nuriyatul Ilmiah
Ulya Ardhia Cahyani Ahmad

Fenomena Pengisian Jabatan
Pegawai Negeri Sipil oleh TNI/POLRI

Moh. Bagus
Amim Thobary
Afif Hidayatul Mahmudah
Faizah Maulidah

Sistem Pemerintahan di Negara-negara
Rumpun Melayu

Nafi' Mubarak

MAGISTER HUKUM TATA NEGARA - PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

JSY	VOL. 1	NOMOR 1	HLM. 1 - 115	MEI	2021
-----	--------	---------	--------------	-----	------



SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial

Volume 1, Nomor 1, Mei 2021; P-ISSN 2776-4540; E-ISSN 2776-3323

SOSIO YUSTISIA: In general accepts article in any subject of law, especially constitutional law issues. Multidisciplinary article are welcomed, but a legal analysis must be strong. Articles are accepted a year-round, and publish twice a year, in May and November.

SOSIO YUSTISIA: In general, the focus of this journal is to share the conceptual thinking of Law known as normative or doctrinal research and socio legal research. Sosio Yustisia aims to provide academic literature which is accessible for legal scientists or jurists and other disciplinary. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted in this journal might cover topical issues in Legal Philosophy, Legal Theory, Constitutional Law, Administrative Law, Sociology of Law, Political of Law, Civil Law, Criminal Law, International Law, Adat Law, Islamic Law, Environmental Law, Gender and Law, and Human Rights.

Twin Towers B Lt. 4

Magister Hukum Tata Negara – Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

Email : sosioyustisia@uinsby.ac.id

Website : <http://jurnalpps.uinsby.ac.id/index.php/sosioyustisia>

SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial

Volume 1, Nomor 1, MEI 2021; P-ISSN 2776-4540; E-ISSN 2776-3323

EDITOR-IN-CHIEF

Anis Farida, UIN Sunan Ampel Surabaya (SCOPUS ID: 57196416813)

SECTION EDITOR

Khoirul Yahya, UIN Sunan Ampel Surabaya (SINTA ID: 6723112)

Muwahid, UIN Sunan Ampel Surabaya (SINTA ID: 6116846)

Moh. Syaeful Bahar, UIN Sunan Ampel Surabaya (SINTA ID: 6723847)

EDITORIAL BOARD

Benny Riyanto, Diponegoro University (SCOPUS ID: 7203018733)

Sulistiyawati Irianto, University of Indonesia (SCOPUS ID: 56705352800)

Ahmad Nur Fuad, UIN Sunan Ampel Surabaya (SCOPUS ID: 57216457845)

Nina Nurmila, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (SCOPUS ID: 56242327500)

Herlambang P. Wiratraman, Airlangga University (SCOPUS ID: 57211074568)

Sri Wiyanti Eddyono, Gadjah Mada University (SCOPUS ID: 57205724636)

Novri Susan, Airlangga University (SCOPUS ID: 57201109158)

Rina Herlina Haryanti, Sebelas Maret University (SCOPUS ID: 57201072938)

Ali Maksum, Brawijaya University (SCOPUS ID: 57201709282)

Priyo Handoko, UIN Sunan Ampel Surabaya (SINTA ID: 6723124)

Titik Triwulan Tutik, UIN Sunan Ampel Surabaya (SINTA ID: 6094144)

Muhammad Khoidin, Jember University (SINTA ID: 6039530)

Sri Warjiyati, UIN Sunan Ampel Surabaya (SINTA ID: 6720224)

Dhia Al Uyun, Brawijaya University (SINTA ID: 6685964)

Himawan Estu Bagijo, Wisnu Wardhana University (Author-ID: 663970)

ASSISTANTS TO THE EDITORS

Moh. Faizur Rohman, UIN Sunan Ampel Surabaya, (SINTA ID: 6655839)

Ulil Manaqib, UIN Sunan Ampel Surabaya, (Author-ID: 1198434)

Fariz Ulul Abshar, UIN Sunan Ampel Surabaya

Millatul Islamiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya, (Google Scholar)

JOURNAL MANAGER

Elva Imeldatur Rohmah, UIN Sunan Ampel Surabaya (Google Scholar)



Dinamika Hukum dalam Masa Pandemi Covid -19

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia (Rahardjo, 2009). Untuk mencapai tujuan tersebut hukum hadir sebagai a tool of social engineering, sebagaimana disampaikan oleh Roscoe Pound dan bukan mengarah kepada dark engineering (Podgorecki & Olgiati, 1996 via Rahardjo, 2009). Perdebatan panjang tentang hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat, ataukah sebaliknya kehadirannya justru mendegradasi keluhuran hukum tergambar nyata dalam masa pandemic covid-19. Dinamika hukum berkejaran dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat situasi darurat akibat pandemi covid-19. Wabah covid-19 yang bermula dari Wuhan, China dalam waktu cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Penetapan status pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) membawa konsekuensi pada munculnya berbagai produk hukum untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sempat menuai protes dari berbagai kalangan, namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya tetap dijalankan. Demikian pula dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Berbagai produk hukum turunan merespon kondisi pandemi covid- 19 melahirkan berbagai isu hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yang dituangkan dalam dua artikel dalam edisi perdana Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Kajian tentang pengupahan tenaga kerja ditulis oleh Himawan Estu Bagijo dalam artikel tentang “Kewenangan Gubernur Menetapkan Upah Pasca Pemberlakuan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Penetapan UMP dan UMK Tahun 2021 di Jawa Timur)”. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di saat pandemi covid-19 tercermin dari penetapan upah di tingkat propinsi maupun kabupaten kota. Masih terkait dengan respon terhadap Covid-19 di tingkat desa terjadi pengalihan anggaran dana desa yang semula untuk kegiatan infrastruktur dialihkan untuk penanganan Covid-19. Potret di tingkat desa tersebut merupakan representasi dari kebijakan di tingkat pusat, yang mengalihkan berbagai mata anggaran

yang ada untuk penanggulangan covid-19. Penetapan skala prioritas untuk melindungi dan menjaga keselamatan warga masyarakat dari bahaya Covid-19 menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Artikel yang mengupas masalah tersebut ditulis oleh Selvy dkk, dengan judul “ Urgensi Peralihan Dana Desa untuk Penanggulangan Bencana Covid - 19”.

Keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara tidak sekedar bersifat reaktif atas kondisi pandemi covid -19, namun juga tercermin dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadi benteng perlindungan bagi warga negara dari kemungkinan kesewenang-wenangan Undang-Undang. Supremasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dengan sifat putusannya yang bersifat final and binding, pada kenyataannya masih problematik. Masalah seringkali muncul terutama ketika ada putusan yang non self executing, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana implikasi yuridisnya. Artikel tentang “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Non Self Executing” ditulis secara kolaboratif oleh Siti Partiah dan Anis Farida. Tulisan selanjutnya tentang “Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Model Kepemimpinan di Indonesia” oleh Fahrur Rozi dkk, meneguhkan model kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Melalui sila keempat Pancasila tersebut direfleksikan tentang model kepemimpinan yang dicita -citakan. Masih tentang sila Pancasila, khususnya sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan beragama di Indonesia. Kehidupan beragama bagi umat Islam tidak sebatas ruang pribadi namun juga menyangkut hubungan dengan sesama, yang tidak terbatas dalam lapangan privat namun juga di ruang publik. Alhasil relasi agama (Islam) dengan negara menjadi isu hukum yang senantiasa menarik dikaji sepanjang masa. Pada edisi pertama ini, Fariz Ulul Abshar dkk menuangkannya dalam artikel yang berjudul “ Relasi Islam -Negara dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”.

Pembentukan hukum sebagai bagian dari praktik hukum di Indonesia, dalam penerapannya masih terus mengalami perkembangan. Pasang surut posisi TNI/Polri dalam struktur pemerintahan berjalan seiring dengan politik hukum yang dijalankan negara. Semasa Orde Baru, dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia meneguhkan posisi prajurit TNI maupun Polri dalam jabatan strategis dalam pemerintahan. Perubahan posisi strategis TNI / Polri terjadi setelah Reformasi 1998 dan amandemen terhadap UUD 1945. Namun setelah sekian tahun reformasi berjalan mulai ada penguatan kembali terhadap posisi TNI/ Polri dengan ditandai lahirnya produk perundangan yang

memberikan panggung untuk memberikan ruang pengabdian yang lebih luas. Melalui UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta PP No. 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ruang gerak bagi TNI/ Polri dibuka. Pro kontra masyarakat terhadap kondisi tersebut tentunya tidak terelakkan, yang dihadirkan secara menarik dalam artikel “Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil oleh TNI/Polri” ditulis oleh Moh. Bagus dkk.

Ruang lingkup kajian hukum tata negara secara luas, salah satunya membahas tentang sistem pemerintahan. Bangunan sistem pemerintahan di suatu negara menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tentunya tidak ketinggalan dengan negara-negara rumpun Melayu, diantaranya adalah Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Menyoroti perkembangan sistem pemerintahan negara-negara tersebut, dengan fokus pada sistem pemerintahannya, serta berusaha mengkaji kedudukan eksekutif dan legislatif berikut hubungan antara keduanya di empat negara tersebut diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan tentang ketatanegaraan. Kajian tersebut dituangkan dalam artikel yang berjudul “Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu”, oleh Nafi Mubarak sebagai artikel penutup di edisi perdana Sosio Yustisa : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Pemimpin Redaksi

Editorial

Legal Dynamics during the Covid-19 Pandemic

Law is an institution aims to lead people to get a just, prosperous life and make people happy (Rahardjo, 2009). To achieve this goal, law exists as a tool of social engineering, as Roscoe Pound said and does not lead to dark engineering (Podgorecki & Olgiati, 1996 via Rahardjo, 2009). The long debate about the law as a means to carry out social change in society, or on the contrary, its presence actually degrades the nobility of the law as show as a social fact during the Covid-19 pandemic. Legal dynamics compete with problems that occur in society due to emergency situations due to the Covid-19 pandemic. The covid-19 outbreak that started in Wuhan, China quickly spread to all over the world, including Indonesia. The determination of pandemic status by the World Health Organization (WHO) has consequences for the emergence of various legal products to address existing problems. The enactment of Law No.11 of 2020 concerning Job Creation (UU Cipta Kerja), had attracted protests from various groups, but with various considerations at the end it was continued. Likewise, Law No.2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No.1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pandemic and / or in the Context of Facing a Threat Endangering the National Economy and / or Financial System Stability to Become a Law.

Various derivative legal products responding to the conditions of the Covid-19 pandemic arise to various interesting legal issues to be studied further, which were stated in two articles in the first edition of *Sosio Yustisia: Journal of Law and Social Change*. The study on labor wages was written by Himawan Estu Bagijo in an article "The Authority of the Governor to Set Wages after the Enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation (Case Study of Establishing UMP and UMK in 2021 in East Java)". Optimism for economic growth during the Covid-19 pandemic is reflected in the setting of wages at the provincial and district levels. Related to the response to Covid-19 at the village level, there was a diversion of the village fund budget, which was originally for infrastructure activities diverted for handling Covid-19. The portrait at the village level is a representation of policies at the top level of government, which

divert various existing budget lines for the response to covid-19. Determining the priority scale to protect and maintain the safety of citizens from the dangers of Covid-19 is a serious concern of the Indonesian government. An article that examines this issue was written by Selvy et al, with the title "The Urgency of Transfer of Village Funds for Covid-19 Disaster Management".

The government's concern in providing protection for citizens is not only reactive to the conditions of the Covid-19 pandemic, but also reflected in the existence of the Constitutional Court after the amendments to the 1945 Indonesian's Constitution. The authority of the Constitutional Court in examining the Law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a bulwark of protection for citizens of the possible arbitrariness of the Act. The supremacy of the Constitutional Court as the guardian of the constitution, with its final and binding decisions, in fact still problematic. Problems often arise, especially when there are decisions that are non self-executing, it is interesting to study further how the juridical implications are. The article on "Juridical Implications of the Constitutional Court Decision which is Non Self Executing" was written collaboratively by Siti Partiah and Anis Farida. The next article on "Implementation of Pancasila Democratic Values in the Leadership Model in Indonesia" by Fahrur Rozi et al, confirms a leadership model that is in accordance with the noble values of the Indonesian nation. Through the four principles of Pancasila, it is reflected on the ideal leadership model. Regarding the Pancasila precepts, especially the first precepts of the One and Only Godhead, are the basis for the implementation of religious life in Indonesia. Religious life for Muslims is not limited to personal space but also concerns relationships with others, which are not limited to the private sphere but also in the public sphere. As a result, the relationship between religion (Islam) and the state has become a legal issue that continues to be interesting to study throughout the ages. In this first edition, Fariz Ulul Abshar et al wrote in an article entitled "Islamic-State Relations in the Formation of Law in Indonesia".

The formation of law as part of legal practice in Indonesia, in application, is still developing. The ups and downs of the TNI / Polri position in the government structure go hand in hand with the legal politics run by the state. During the New Order, the dual function (*dwi fungsi*) of the Armed Forces of the Republic of Indonesia confirmed the position of TNI and Polri soldiers in

strategic positions in the government. This strategic position changed took place after the 1998 Reformation and amendments to the 1945 Constitution. However, after a number of years the reformation began to reinforce the position of the TNI / Polri, marked by the birth of legislation products that provided the stage to provide wider space for service. Through Law no. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, as well as Government Rules (PP. No 17 of 2017) concerning the Management of Civil Servants, the space for the TNI / Polri is opened. The pros and cons of society towards this condition are certainly inevitable, which is presented in an interesting article entitled "The Phenomenon of Filling Civil Servant Positions by TNI / Polri" written by Moh. Bagus et al.

The scope of constitutional law cover many issues, one of them discusses the system of government. The building of the government system in a country is one of the determining factors for the sustainability of the life of the nation and state, and of course it is not left behind with the Malay family countries, including Brunei, Indonesia, Malaysia and Singapore. Highlighting the development of the governmental systems of these countries, with a focus on their governmental systems, as well as trying to examine the executive and legislative positions and the relationship between them in the four countries are expected to enrich the repertoire of knowledge about state administration. The study is written in an article entitled "Government Systems in Malay Family Countries", by Nafi Mubarak as a closing article in the first edition of *Sosio Yustisa: Journal of Law and Social Change*.

Happy reading and hopefully useful.

Editor in Chief